

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Setelah dianalisis melalui aspek relevansi, reliabilitas, sensitivitas, akseptabilitas, praktikal, tidak melanggar Undang-undang, dapat disimpulkan bahwa sistem evaluasi kinerja melalui penggunaan Aplikasi E-Visum di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah memenuhi serangkaian tahap sistem evaluasi manajemen kinerja. Secara lebih rinci, analisis sistem evaluasi manajemen kinerja sistem aplikasi E-Visum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari aspek relevansi, Aplikasi E-visum merupakan perwujudan pencapaian tujuan Bangsa Kencana BKKBN melalui program penerapan konsep e-government dalam mengelola internal organisasinya. Prioritas BKKBN dalam meningkatkan kinerja melalui pemantauan kegiatan penyuluh KB di lini lapangan ditunjang dengan adanya Aplikasi E-Visum.
2. Dari tahap reliabilitas, sarana media berbasis digital dipilih agar dapat menampilkan informasi pencapaian kinerja yang reliabel dan tidak ada kecurangan. Dalam operasional Aplikasi E-Visum, penilaian kinerja didasarkan pada sistem penilaian angka kredit untuk Penyuluh KB, sehingga terdapat konsistensi standar penilaian yang terintegrasi dengan sistem. Penilaian yang diperoleh dari penyuluh KB di lini lapangan mengisyaratkan bahwa sistem pencatatan kinerja melalui Aplikasi E-Visum dapat dipercaya. Terdapat informasi peringkat penyuluh KB yang melakukan kegiatan terbaik, sehingga membuahkan respon positif

dari penyuluh KB dalam melakukan pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi E-Visum.

3. Pada aspek sensitivitas, terdapat subaspek kriteria penilaian dan kategori penilaian. Kriteria penilaian yang terdapat dalam Aplikasi E-Visum adalah sangat baik, baik, buruk, dan sangat buruk. Upaya untuk menentukan kriteria hasil kinerja adalah dengan melihat pencapaian target sesuai laporan dan bukti dokumentasi yang dilampirkan. Sedangkan kategori kinerja dalam aplikasi E-Visum berdasarkan pada jenjang jabatan fungsional masing-masing penyuluh KB. Tiap jabatan fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, sehingga terdapat kategori penilaian yang digunakan dalam aplikasi E-Visum.
4. Pada aspek akseptabilitas, Aplikasi E-Visum bermanfaat untuk kepentingan organisasi melalui pencatatan sasaran kinerja pegawai untuk penyuluh KB. Aplikasi E-Visum juga dapat menyediakan perhitungan tunjangan kinerja serta angka kredit yang akan didapatkan oleh penyuluh KB.
5. Pada aspek praktikal, Aplikasi E-Visum memiliki kemudahan untuk diakses karena menggunakan sistem digital sehingga dapat diakses dimanapun. Dalam proses penilaian, penilai menyampaikan hasil penilaian kinerja ternilai yang termuat dalam instrumen penilaian kinerja, disertai penjelasan mengenai nilai tersebut dan dilengkapi data pendukung yang diperoleh selama penilaian berlangsung dalam kurun waktu penilaian kinerja yang berjalan. Penilaian yang diberikan berlandaskan standar penilaian yang tertuang dalam peraturan sehingga

tidak terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik antara BKKBN sebagai penilai dan Penyuluh KB sebagai ternilai.. Selain itu, tersedia kesempatan bagi Penyuluh KB untuk mengajukan keberatan apabila terdapat hasil penilaian kinerja yang dirasa tidak sesuai dengan peraturan, yaitu melalui kolom keberatan dalam penilaian kinerja.

6. Aplikasi E-Visum memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Aplikasi E-Visum dilandasi oleh peraturan agar dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam mengukur kinerja karyawan, maka standar kinerja harus memenuhi syarat memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.
7. Berdasarkan kelima aspek sistem evaluasi manajemen kinerja yang telah dimiliki oleh sistem Aplikasi E-Visum, dapat disimpulkan bahwa Aplikasi E-Visum dapat meningkatkan keefektifan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan kinerja tenaga lini lapangan karena fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi disesuaikan dengan standar kebutuhan yang diperlukan oleh Penyuluh KB.

B. Implikasi

1. Harus dilakukan pembaharuan berkala pada Aplikasi E-Visum dengan berkaca pada evaluasi pencapaian tujuan dan strategi BKKBN, sehingga

relevansi Aplikasi E-Visum terhadap pencapaian tujuan dan strategi BKKBN dapat diperoleh secara simultan.

2. Disarankan adanya media komunikasi antara pihak penilai dengan pihak ternilai yang dapat diakses setiap saat, sehingga apabila terdapat rasa keberatan atau kejanggalan dari penyuluh KB sebagai pihak ternilai, mereka dapat menyampaikannya secara leluasa dan dapat direspon dengan cepat.
3. Sebaiknya perlu diadakan sistem reward untuk penyuluh KB terkait kategori dan kriteria penilaian kinerja, sehingga pemahaman dan kinerja penyuluh KB meningkat dan pencapaian tujuan BKKBN terakselerasi.
4. Mendorong pengelolaan E-Visum baik di tingkat Pusat, Perwakilan BKKBN Provinsi, OP Bidang Dalduk dan KB maupun Penyuluh KKBPK sendiri yang tergabung dan membentuk Grup di media sosial untuk aktif mengingatkan akan pengisian E-Visum. Selain itu juga selalu meningkatkan wawasan pengetahuan Penyuluh KKBPK dalam rangka pengembangan budaya nilai dan perilaku kinerja.
5. Perlu dilakukannya focus group discussion antara BKKBN dengan penyuluh KB di lini lapangan terkait kendala-kendala yang dihadapi pada saat penggunaan aplikasi. Hal ini ditujukan agar pengembangan aplikasi dapat mengakomodir kebutuhan penyuluh KB sebagai pengguna/user dari aplikasi tersebut.